



ANALISIS DISPARITAS INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL EKONOMI DI PROVINSI BANTEN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

ABSTRAK

Relevansi kajian tentang disparitas infrastruktur fisik dan sosial ekonomi antara lain terletak pada upaya untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah yang relatif tertinggal sehingga dalam jangka menengah dan panjang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Posisi geografis Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Megalopolitan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) membawa konsekuensi jika provinsi Banten terlihat heterogen. Langsung atau tidak langsung kabupaten dan kota Tangerang serta kota Tangerang Selatan yang menjadi bagian dari Provinsi Banten mendapat efek limpahan (spillover) kota Jakarta karena akses infrastruktur dan transportasi yang lebih baik. Struktur ekonomi di masing-masing ketiga kabupaten dan kota didominasi oleh sektor industri, dengan PDRB per kapita yang rata-rata lebih tinggi dari daerah lainnya khususnya dibandingkan dengan bagian tengah dan selatan Banten. Dikotomi regional antara koridor utara dibandingkan dengan dengan kawasan tengah dan selatan provinsi Banten tidak hanya dapat dilihat dari indikator ekonomi seperti Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor industri per kapita atau PDRB per kapita, tetapi juga indikator sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Struktur ekonomi Provinsi Banten didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi lebih dari 32% PDRB dengan pertumbuhan rata-rata 3,5% per tahun selama kurun waktu 2014-2017, kemudian diikuti sektor Perdagangan dan konstruksi masing-masing merupakan sektor kedua dan ketiga terbesar setelah industri. Secara spasial terlihat jika sektor industri di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang bersama-sama dengan kota Cilegon dan kota Tangerang memberikan warna sektor industri di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kinerja realisasi investasi di Banten mencapai Rp 42,5 triliun pada 2015 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 100.032 orang.

1. PENDAHULUAN

Seperti halnya dengan pembangunan regional di Indonesia, salah satu isu dalam pembangunan regional di Provinsi Banten adalah mengenai pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial antarwilayah, dalam hal ini antar-kabupaten dan kota. Pembangunan ekonomi di kabupaten dan kota tentunya tidak sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi lebih jauh dari itu yaitu menyangkut kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang tinggi tetapi lebih dimaksudkan agar masyarakat mempunyai akses terhadap infrastruktur sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial budaya.

Setiap kabupaten kota memiliki potensi sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) ditambah lagi dengan faktor geografis yang berbeda sehingga ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan atau disparitas kesejahteraan masyarakat. Informasi mengenai hasil pembangunan sosial ekonomi dapat dijadikan evaluasi seberapa jauh program pembangunan sosial ekonomi berjalan seperti direncanakan. Jika diperinci lebih lanjut banyak faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sosial di daerah antara lain karena faktor infrastruktur, kondisi geografi, faktor lokasi ataupun karena kondisi sosial budaya dan faktor institusi.

Posisi geografis Provinsi Banten yang dekat dengan Kota Megalopolitan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) membawa konsekuensi jika provinsi ini terlihat heterogen. Di satu sisi, kabupaten dan kota yang menjadi bagian administratif dari provinsi Banten yang merupakan bagian dari Jabodetabek adalah kota dan kabupaten dengan pendapatan per kapita yang tinggi yang sangat berbeda kondisinya dengan di daerah bagian selatan provinsi Banten yang merupakan merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Catatan lain yang perlu diungkapkan di sini adalah bahwa bersama-sama dengan Kota Cilegon, Kabupaten Serang merupakan daerah

dengan kontribusi nilai tambah bruto sektor industri paling tinggi dalam perekonomiannya. Dikotomi regional antara kawasan timur-barat dibandingkan dengan dengan kawasan selatan provinsi Banten akan dapat digambarkan tidak hanya dalam indikator ekonomi seperti PDRB per kapita, tetapi juga indikator sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Provinsi Banten yang terletak di ujung barat pulau Jawa memiliki kekayaan sejarah dan kondisi sosial ekonomi yang dinamis namun dibalik itu ada sisi lain yang dapat dilihat yaitu masalah ketimpangan. Di satu sisi struktur ekonomi regional provinsi ini didominasi oleh sektor industri manufaktur namun sebenarnya lebih terkonsentrasi di bagian utara provinsi. Terdapat indikasi bahwa tenaga kerja sektor industri lebih banyak diambil oleh pendatang dibandingkan dengan penduduk setempat. Di sisi lain sektor pertanian masih cukup tinggi di kabupaten bagian selatan namun belum dikelola secara optimal.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 (revisi 2019) terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten antara lain mengenai persoalan ketimpangan. Bertolak dari RPJMD tersebut diperlukan identifikasi lebih lanjut tentang persoalan ketimpangan khususnya dilihat dari perspektif spasial. Dengan pendekatan spasial ini diharapkan pihak legislatif dan eksekutif dapat melihat ketimpangan secara lebih jelas dan fokus khususnya dalam hal membuat produk hukum dan legislasi terkait.

2. PEMBAHASAN

Relevansi kajian tentang disparitas infrastruktur fisik dan sosial ekonomi antara lain terletak pada upaya untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah yang relatif tertinggal sehingga dalam jangka menengah dan panjang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Posisi geografis Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Megalopolitan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) membawa konsekuensi jika provinsi Banten terlihat heterogen.

Langsung atau tidak langsung kabupaten dan kota Tangerang serta kota Tangerang Selatan yang menjadi bagian dari Provinsi Banten mendapat efek limpahan (spillover) kota Jakarta karena akses infrastruktur dan transportasi yang lebih baik. Struktur ekonomi di masing-masing ketiga kabupaten dan kota didominasi oleh sektor industri, dengan PDRB per kapita yang rata-rata lebih tinggi dari daerah lainnya khususnya dibandingkan dengan bagian tengah dan selatan Banten. Dikotomi regional antara koridor utara dibandingkan dengan dengan kawasan tengah dan selatan provinsi Banten tidak hanya dapat dilihat dari indikator ekonomi seperti Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor industri per kapita atau PDRB per kapita, tetapi juga indikator sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perekonomian di Provinsi Banten, sebagaimana halnya dengan wilayah lain di Pulau Jawa ditandai dengan peranan sektor industri pengolahan cukup menonjol dibandingkan dengan wilayah lain di luar Jawa. Di Provinsi Banten, sektor industri pengolahan bahkan menjadi sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian. Terdapat kecenderungan naiknya kontribusi sektor industri ini dalam perekonomian sementara kontribusi sektor pertanian terus menurun dan dibarengi dengan kenaikan kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap output daerah Provinsi Banten.

Jika dirunut dari sejarahnya, dahulu ketika wilayah Banten masih di bawah Kesultanan Banten, Banten telah dikenal luas sebagai salah satu wilayah pelabuhan yang besar. Pelabuhannya saat itu bahkan termasuk yang terbesar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Oleh karenanya, potensi Banten sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan sebenarnya cukup besar. Semakin dominannya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Banten dewasa ini oleh karenanya menjadi indikasi semakin tergarapnya potensi tersebut.

Jika pengamatan dilakukan sejak tahun 2014 hingga 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten rata-rata-rata mencapai 5,6% yang berarti lebih tinggi

dari pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata bertumbuh kurang lebih 5,0% per tahun pada periode yang sama. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1, pertumbuhan yang cukup menonjol adalah sektor informasi dan telekomunikasi yang mencapai rata-rata 8,4%, tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Dapat juga diamati di sini bahwa selain sektor informasi dan telekomunikasi pertumbuhan yang relatif tinggi terjadi pada sektor jasa seperti keuangan, akomodasi, transportasi serta jasa pendidikan yang bertumbuh rata-rata di atas 7%.

Struktur ekonomi Provinsi Banten didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi lebih dari 32% PDRB dengan pertumbuhan rata-rata 3,5% per tahun selama kurun waktu 2014-2017, kemudian diikuti sektor Perdagangan dan konstruksi masing-masing merupakan sektor kedua dan ketiga terbesar setelah industri (Tabel 3.2).

Secara spasial terlihat jika sektor industri di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang bersama-sama dengan kota Cilegon dan kota Tangerang memberikan warna sektor industri di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kinerja realisasi investasi di Banten mencapai Rp 42,5 triliun pada 2015 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 100.032 orang.

Jika dilihat lebih mikro atau meso, besarnya kontribusi sektor industri manufaktur tersebut didominasi industri skala besar dan lokasinya terletak pada kawasan di sepanjang pantai utara Banten. Dilihat dari jumlah usaha, pada 2018, kegiatan industri kecil dan menengah mencapai 96,3% dari total seluruh usaha industri, sisanya adalah industri menengah dan besar. Dari 3,3 juta tenaga kerja secara keseluruhan, 30% persen di antaranya bekerja di sektor industri, disusul kemudian di sektor perdagangan. Khususnya di sektor industri, penyerapan tenaga kerja yang berasal dari penduduk Banten sendiri masih sangat terbatas. Di sisi lain, jumlah industri kecil dan menengah (IKM) masih sangat terbatas sehingga mempunyai keterbatasan pula untuk menyerap tenaga kerja.

Dengan kontribusi sektor industri manufaktur yang paling dominan, ada realitas lain yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan regional yaitu terbatasnya tenaga kerja yang diserap oleh industri manufaktur skala besar. Hal ini disebabkan antara lain karena secara umum daya saing lulusan sekolah menengah kejuruan di provinsi Banten dapat dikatakan masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran lulusan sekolah kejuruan dengan persentasi yang cukup tinggi. Di samping itu rendahnya serapan terhadap tenaga kerja asal Banten sendiri disebabkan karena masuknya tenaga kerja dari luar Banten yang dianggap lebih berdaya saing.

Perlu juga diberi catatan bahwa persoalan SDM di Provinsi Banten tidak hanya dilihat secara makro saja tetapi juga secara spasial. Di satu sisi, kualitas pendidikan di beberapa kabupaten/kota yang berbatasan dengan kota metropolitan Jakarta seperti Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan kota Cilegon dapat dikatakan mempunyai kualitas pendidikan di atas rata-rata provinsi. Di kabupaten lainnya khususnya Lebak, Pandeglang menghadapi persoalan kualitas pendidikan yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Survei Ekonomi Nasional 2016 menunjukkan bahwa di Provinsi Banten terdapat sekitar 973.000 unit usaha non-pertanian, 97,86 % di antaranya adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Tabel 3.4). Dari jumlah tersebut 10,15% di antaranya bergerak di sektor industri yang sebagian besar juga didominasi oleh UKM (Gambar 3.1). Walaupun UKM mendominasi jumlah usaha industri namun Industri sedang dan besar menyerap tenaga kerja dan dengan output yang lebih besar. Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Usaha Mikro adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja maksimal 4 orang, jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang untuk industri kecil, Industri Usaha Menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-50 dan Industri Usaha Besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 50 orang. Profil sektor industri di provinsi Banten menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi di antara kabupaten dan kota. Di sini terlihat sektor industri besar dan dan sedang

terkonsentrasi di Kabupaten Tangerang, Serang dan kota Cilegon.

Dalam hal ketimpangan pendapatan yang diukur dari koefisien Gini, secara keseluruhan terdapat penurunan ketimpangan. Seperti pola umum yang terjadi, ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan lebih tinggi dari perdesaan di provinsi Banten.

3. KESIMPULAN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penyusunan jurnal ini antara lain bertujuan untuk mengidentifikasi disparitas infrastruktur dan sosial di Provinsi Banten sebagai landasan untuk kebijakan untuk pemerataan hasil pembangunan. Dalam skala makro regional, berbagai strategi dan kebijakan dapat dilakukan antara lain perlunya peningkatan konektivitas infrastruktur antara daerah bagian selatan Banten dengan bagian utara yang infrastrukturnya telah berkembang pesat. Konektivitas infrastruktur antara daerah selatan dengan utara ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan produk lokal dengan pasar domestik yang lebih besar melalui perdagangan intra dan interregional.

Implikasi bagi pengembangan perdagangan interregional adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan, energi, angkutan multimoda di berbagai daerah yang potensi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru, Pengembangan pusat kegiatan ekonomi baru mempunyai makna bahwa pusat pertumbuhan mempunyai kekuatan aglomerasi untuk menarik konsentrasi kegiatan ekonomi, Konsentrasi kegiatan ekonomi melalui kekuatan aglomerasi antara lain ditunjang oleh biaya transportasi yang minimum antara lokasi produksi dengan pasar domestik regional dan internasional.

Dalam hal infrastruktur kesehatan masih terdapat kesenjangan tidak hanya dalam hal kuantitas fasilitas kesehatan tetapi kualitas tenaga medis termasuk ketersediaan dokter spesialis di berbagai kabupaten kota.

Catatan penting perlu dikemukakan tentang ekspektasi hasil studi ini adalah sebuah tinjauan ataupun review terhadap kebijakan pembangunan regional yaitu aspek kelembagaan, Secara umum dapat disampaikan bahwa analisis tentang pembangunan regional di Indonesia cenderung dilihat dari

persepektif neoklasik yang sangat percaya pada peranan lancarnya mobilitas faktor-faktor produksi antar daerah, Pendekatan neoklasik percaya bahwa dengan lancarnya mobilitas faktor faktor produk melalui kelancaran arus barang dan mansia antara daerah maka dalam jangka panjang akan terjadi konvergensi pertumbuhan regional,

Paradigma berpikir neoklasik di atas perlu direview dan dievaluasi secara kritis bahwa konvergensi pertumbuhan ekonomi menyangkut aspek non ekonomi seperti social capital, Hal inilah yang relatif jarang disentuh dalam kebijakan pembangunan regional, Pengembangan social capital antara lain melalui keberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan memerlukan proses jangka panjang sehingga secara politis, pendekatan ini tidak terlalu mendapat perhatian dibandingkan dengan pendekatan lain yang hasilnya lebih cepat dilihat, khususnya pembangunan infrastruktur.

Beberapa catatan lain yang perlu dikemukakan pada studi awal ini setelah mereview lima variable utama pembangunan daerah adalah:

Pertama, analisis yang memasukkan aspek institusi, khususnya perspektif “new institutional economics”,

Kedua, integrasi antara analisis ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, Hal ini sejalan juga dengan konsepsi “sustainable development” yang memperhatikan ketiga unsur tersebut secara teritegrasi, Sejauh ini terdapat indikasi bahwa analisis pada pembangunan regional msih bersifat parsial antara pendekatan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya,

Ketiga, memasukkan unsur knowledge regional economy, khususnya yang terkait dengan peranan teknologi informasi bagi pengembangan regional ke depan, termasuk juga rekomendasi regional innovation system,

Dalam upaya untuk membuat semacam new perspective of regional development di Provinsi Banten, studi awal diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi studi selanjutnya yang lebih terinci dan dapat diimplementasikan masing-masing kabupaten dan kota.

4. REFERENSI

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.17, No.1.
- Dumairy. (2000). *Perekonomian Indonesia*. Cetakam kelima. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Jhingnan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekaran, Uma. (2010). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Karya Salemba Empat
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makroekonomi, Teori Pengantar*, Edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Yogyakarta: LP3ES
- Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, Irawan. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Tambunan, Tulus. 2001. *Industrialisasi Negara Berkembang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta: Penerbit Erlangga.